

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP SUMMIT 2023

OGI NEWS

5-8 SEPTEMBER 2023



Pada tanggal 5-8 September 2023, delegasi Indonesia menghadiri rangkaian acara Open Government Partnership (OGP) Summit 2023 di Tallin, Estonia. OGP Summit merupakan pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali untuk mengakselerasi inisiatif keterbukaan pemerintah yang dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan. Penyelenggaraan OGP Summit 2023 ini bertujuan untuk mengakselerasi inisiatif keterbukaan pemerintah di tingkat nasional dan lokal melalui pembahasan di isu-isu strategis global keterbukaan pemerintah.

On September 5-8 2023, Indonesian delegation attended the Open Government Partnership (OGP) Summit 2023 in Tallin, Estonia. OGP Summit is a high-level meeting held every two years to accelerate open government initiatives attended by various government representatives, civil society, and development partners. The implementation of OGP Summit 2023 aims to accelerate open government initiatives at the national and local levels through discussions on global strategic issues of open government.

OGP Summit 2023 menghadirkan 11 Sesi Strategy Track yang membahas penguatan peran keterbukaan pemerintah di level nasional maupun lokal, 33 Sesi Thematic Track yang membahas isu-isu prioritas keterbukaan pemerintah, dan 24 side events yang diselenggarakan oleh berbagai mitra OGP dari unsur pemerintah dan non-pemerintah. Total 38 perwakilan terdiri dari 12 perwakilan pemerintah pusat, 9 perwakilan pemerintah daerah, dan 16 perwakilan masyarakat sipil menjadi bagian dari Delegasi Indonesia yang mengikuti rangkaian kegiatan OGP Summit 2023. Adapun isu-isu global keterbukaan pemerintah yang menjadi prioritas dalam OGP Summit 2023 meliputi isu anti-korupsi, pemerintahan digital, akses keadilan, iklim dan lingkungan, ketahanan demokrasi, serta ruang kewargaan dan partisipasi publik.

Salah satu sesi Strategic Track yakni sesi "Open Government Strategies: Learning from Experiences to Date" membahas bahwa penyusunan rencana aksi perlu dilakukan secara detail, hal ini untuk mengkonkritkan strategi/rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, diperlukan pula payung hukum dalam mendukung keberhasilan implementasi rencana aksi dan standar prosedur yang memberikan pedoman penerapan tata kelola dan nilai-nilai keterbukaan pemerintah dalam setiap tahapan pembangunan.

OGP Summit 2023 featured 11 Strategy Track Sessions which discussed about strengthening the role of open government at the national and local levels, 33 Thematic Track Sessions that discussed around open government priority issues, and 24 side events organized by various OGP partners from government and non-government elements. A total of 38 representatives consisting of 12 central government representatives, 9 local government representatives, and 16 civil society representatives were part of the Indonesian Delegation that participated in the series of OGP Summit 2023. The global open government issues prioritized at the OGP Summit 2023 include anti-corruption, digital governance, justice, climate and environment, democratic resilience, and civic space and public participation.

One of the Strategic Track sessions, namely the session of "Open Government Strategies: Learning from Experiences to Date" discussed that the preparation of action plans needs to be done in detail, this is to concretize the strategy of activity plan to be implemented. In addition, a legal protection is also needed to support the successful implementation and a standardized action plan procedure that provides guidelines for implementing governance and open government values at every stage of development process.

Kesimpulannya, dalam meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan kerja sama antara masyarakat sipil dan pemerintah. Keberhasilan OGP sebaiknya tidak hanya diukur dari terlaksana atau tidaknya rencana aksi. Lebih dari itu, Pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan mampu membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam setiap aspek pemerintahan. Indonesia pada dasarnya mampu menjadi contoh baik bagi berbagai negara dalam pelaksanaan rencana aksi OGP. Kedepan, Indonesia harus mampu menjadi contoh dalam menumbuhkan budaya open government baik di sisi pemerintah maupun masyarakat sipil serta di level nasional maupun di level lokal.

Sementara itu salah satu sesi thematic track ialah mengenai "People-Centered Justice in a Time of Intersecting Crises: From Commitment to Action" sesi ini mengundang Plt. Sekretaris BPHN Kemenkumham, Bapak Constantinus Kristomo sebagai narasumbernya. Diskusi panel ini berupaya untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan hukum yang berperspektif pada keadilan yang berpusat di masyarakat. Praktik baik dari negara lain, dalam hal ini negara Filipina memiliki konsep Alternative Justice System (AJS) yang telah menghasilkan kepercayaan di masyarakat dalam penyelesaian hukum secara informal.

In conclusion, improving transparency, public participation, and accountability in governance requires cooperation between civil society and government. The success of OGP should not only be measured by whether or not the action plan is implemented. More than that, the government and civil society are expected to be able to open the widest possible public participation in every aspect of government. Indonesia is basically able to be a good example for various countries in implementing OGP action plans. In the future, Indonesia must be able to become an example in fostering an open government culture both on the government and civil society sides as well as at the national level and at the local level.

Meanwhile, one of the thematic track sessions was regarding "People-Centered Justice in a Time of Intersecting Crises: From Commitment to Action", this session invited Acting Secretary of BPHN Kemenkumham, Mr. Constantinus Kristomo as one of the speaker. This panel discussion sought to discuss the resolution of legal problems from the perspective of people-centered justice. Good practices from other countries, in this case the Philippines has an Alternative Justice System (AJS) concept that has generated trust in the community in informal legal settlements.

Dalam konsep ini, AJS tidak hanya dilaksanakan oleh Advokat melainkan juga oleh masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan. Melihat bentuk praktik baik tersebut, Indonesia memiliki hal serupa dalam kerangka implementasi bantuan hukumnya. Indonesia mendorong Organisasi Advokat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum melalui sistem Probono dikarenakan keterbatasan anggaran bantuan hukum dalam APBN. Dalam praktiknya pula, di Indonesia beberapa Tokoh Agama dan Masyarakat, Ketua Adat, dan Kepala Desa/Lurah diberikan pelatihan Paralegal untuk menjalankan bantuan hukum.

Kesimpulannya, sumber daya yang disediakan negara saat ini untuk membuka akses terhadap keadilan melalui program bantuan hukum masih sangat terbatas. Oleh karena itu, selain menambah ketersediaan sumber daya, pemerintah perlu memikirkan atau mendesain ulang layanan-layanan publik yang saat ini disediakan dan mengkombinasikannya dengan layanan bantuan hukum, sehingga upaya membuka akses terhadap keadilan bisa lebih terintegrasi. Di sisi lain, penting melihat kebutuhan riil masyarakat, sehingga pemerintah bisa menyesuaikan sumber daya yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, akses terhadap keadilan juga bergantung pada kemampuan masyarakat, sehingga pemerintah juga perlu memastikan pemberdayaan hukum di level akar rumput terus dijalankan.

In this concept, AJS is not only carried out by advocates but also by people who have obtained the training. Looking at this form of good practice, Indonesia has something similar in its legal aid implementation framework. Indonesia encourages Advocate Organizations to reach out to people who need legal assistance through the Probono system due to the limited legal aid budget in the state budget. In practice, in Indonesia, several religious and community leaders, customary chiefs, and village heads are given paralegal training to carry out legal aid.

In conclusion, the resources currently provided by the state regarding open access to justice through legal aid programs are still very limited. Therefore, in addition to increasing the availability of resources, the government needs to think about or redesign the public services that currently provided, and combine them with legal aid services, so that efforts to open access to justice can be more integrated. On the other hand, it is important to look at the real needs of the community, so that the government can adjust existing resources to the needs of the community. Lastly, access to justice also depends on the ability of the community, so the government also needs to ensure that legal empowerment at the grassroots level continues to be carried out.